

**FUNGSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
(MUSRENBANGKOT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA SURAKARTA**



Oleh :

RACHMAT WIBISONO

E. 1105116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**FUNGSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
(MUSRENBANGKOT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA SURAKARTA**



Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

SUGENG PRAPTONO, SH, MH

NIP. 131 411 016

Pembimbing II

SUTEDJO, SH, MM

NIP. 131 571 617

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

FUNGSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (MUSRENBANGKOT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA

Disusun Oleh :

RACHMAT WIBISONO

NIM : E.1105116

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari

Pada :

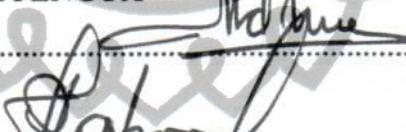
Tanggal

: Senin

: 23 Februari 2009

TIM PENGUJI

1. (Maria Madalina, SH, M.Hum)
Ketua Penguji

: 

2. (Sugeng Praptono, SH, MH)
Sekretaris

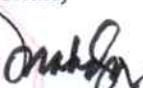
: 

3. (Sutedjo, SH, MM)
Anggota

: 

MENGETAHUI

Dekan,



MOH. JAMIN, SH, M.Hum

NIP. 131 570 154

ABSTRAK

RACHMAT WIBISONO, 2009. FUNGSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (MUSRENBANGKOT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot) di Kota Surakarta selain itu juga untuk mengatahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Surakarta dan salah satu warga masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Musrenbangkot dengan sample di Kecamatan Jebres dan Kelurahan Semanggi. Jumlah responden 3 orang yaitu : 1) Drs. Jonny Hari Sumantri, MM selaku Kepala Bidang Penyusunan Program BAPEDA Kota Surakarta, 2) Sumarno, S.Sos selaku Camat Jebres, 3) Suparno selaku Ketua LPMK Kelurahan Semanggi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Musrenbangkot berfungsi sebagai : 1) Sarana partisipasi dan wadah komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta, 2) Sarana pembentukan kelembagaan sosial masyarakat, 3) Sarana mewujudkan *Good Governance*, 4) Pedoman dan acuan penyusunan prioritas pembangunan dan APBD Kota Surakarta, 5) Serta forum untuk mengesahkan pelaksanaaan pembangunan daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Surakarta.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Musrenbangkot adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal pencairan dana pembangunan kurang lancar, 2) Sering terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, 3) Beberapa usulan dari warga masyarakat belum mengacu kepada kebutuhan pembangunan, 4) Kemampuan masyarakat dalam pembuatan proposal pembangunan belum optimal, 5) Data-data kelompok sektoral dan LSM yang akan diikutkan dalam pelaksanaan Musrenbangkot belum lengkap, 6) Sosialisasi berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot belum optimal. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) Kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan program perlu ditingkatkan, 2) Pelatihan khusus tentang pembuatan proposal dan laporan administrasi secara baik dan benar serta membuat aturan tegas untuk dipatuhi bersama, 3) Sosialisasi yang baik dari BAPEDA kepada masyarakat terkait jadwal pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot, 4)

Perlu dilakukan akuratisasi data sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan, 5) Kerja sama yang baik dari pihak BAPEDA, DPRD, LSM dan elemen sektoral lainnya dalam kegiatan Musrenbangkot agar dapat tersusun prioritas-prioritas pembangunan yang baik dan tepat sasaran, 6) Melakukan komunikasi dan penyelesaian yang baik apabila terjadi konflik atau masalah dalam pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam maupun Musrenbangkot.



MOTTO

“Ora et Labora” Belajar dan Berdoa.

“Perbuatan paling baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain, one for all....all for one”.

(Mario Teguh)

“Masa lalu hanyalah pembelajaran, Jadilah manusia super dengan belajar dari masa lalu dan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu”.

(Mario Teguh)

“Masyarakat yang maju tidak cukup hanya perciri produktif, tetapi juga bersifat kreatif”.

(Prof. Dr. Fuad Hasan)

“.....Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat....”

(QS. Mujaadilah : 11)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Aminah, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sugeng Praptono, SH, MH selaku pembimbing I penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Sutedjo, SH, MM selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Pius Triwahyudi, SH, M.Si, selaku pembimbing akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
7. Bapak Drs. Jonny Hari Sumantri, MM selaku Kepala Bidang Penyusunan Program Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Surakarta, Bapak

Sumarno S.Sos selaku Camat Jebres dan Bapak Suparno selaku Ketua LPMK Kelurahan Semanggi yang telah memberikan data kepada penulis selama mengadakan penelitian.

8. Mama dan alm. Papa yang memberikan inspirasi penulisan skripsi ini dan doa restu, selalu memotivasi dan memberikan kasih sayangnya kepadaku.
9. Kakakku Mbak Shinta dan Mas Agus serta ponakanku Evan terima kasih atas segala doanya.
10. Om Agus, terima kasih atas segala masukannya, dan motivasinya.
11. Saudara-saudara ku, Pakde dan Bude Ungaran, Mbak Ani dan Wati, Mas Hari, Mas Kokok terima kasih atas doa dan Support nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Mbak Ari, Mbak Rizta dan Tya, makasih doa dan dukungannya.
13. Sahabat Kartiko, Arif, Sasti, Fita, Wahyu, Ilham, Adi, Ari, Wisnu, Sandy, Tio, Danang, Dody, Karuniawan, Setiawan, Alfian, Itut, Rani, Muna, Nanda yang selalu menemaniku, memberikan doa dan dorongan serta tempat curahan hati.
14. Teman-teman FH UNS, Ronggo, Singgih, Ihsan, Bintang, Retno, Luki, Hermin, Yuke, Nana, Puri, Mayang, Widya, Yugo, Dilla, Ratih, Andjani, Stella, Alyn, Damar, Dalang, Gunawan, Rudi, Dll. "VIVA JUSTICIA, KAMI BANGGA ADA DI SINI".
15. Teman-temanku Tity, Sita, Henky, Hesty, Mega, Nitya, Asti, Dilla, Nia, Palupi sukses buat kalian.

Penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Dengan lapang dada penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini

Surakarta, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	18
2. Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Kota	23
3. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan	26
4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	29
5. Tinjauan Umum Tentang Musrenbang	33
6. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat	36
B. Kerangka Pemikiran	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Badan Perencanaan Daerah	43

1. Gambaran Umum Kota Surakarta	43
2. Gambaran Perekonomian Kota Surakarta	46
3. Visi Misi Kota Surakarta	47
4. Kedudukan Badan Perencanaan Daerah Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Surakarta	48
5. Kedudukan Tugas dan Fungsi Pokok Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta	52
6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta	53
7. Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta	56
B. Fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot) di Kota Surakarta	65
1. Dasar Hukum pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta	65
2. Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Surakarta	72
a. Pelaksanaan Musrenbangkel	73
b. Pelaksanaan Musrenbangcam	79
c. Pelaksanaan Musrenbangkot	84
3. Fungsi Pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta	88
C. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Musrenbangkot di Kota Surakarta dan solusinya	95
1. Faktor-faktor Hambatan	95
2. Solusi	98
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif	15
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran	41
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Surakarta	51
Gambar 4 : Bagan Struktur Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta	55

